

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui, kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan taat pajak kendaraan bermotor. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan peraturan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu potensi terbesar dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, namun masih banyak masyarakat yang tidak taat pajak yang mengakibatkan pemerintah daerah harus membuat suatu upaya guna untuk mendapatkan pajak baru dan berharap untuk masyarakat mau untuk membayar pajak nya. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, dimana adanya kewenangan yang dimiliki Gubernur Provinsi Jambi ini, setiap akan dilaksanakannya kebijakan tersebut Gubernur mengeluarkan surat Keputusan Gubernur. Metode Penelitian ini dilakukan melalui hukum empiris yang menggunakan data primer sebagai sumber utama, lokasi penelitian berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jambi pada tahun 2020 ada sejumlah 2,185,414 Unit kemudian wajib pajak yang taat membayar pajak hanya 665,831 Unit sehingga persentase yang bayar hanya 30%, yang menggunakan program kebijakan penghapusan administrasi sebanyak 56,723 unit. Pada tahun 2021 ada sejumlah 2,319,596 Unit kendaraan bermotor di Provinsi Jambi kemudian wajib pajak yang membayar pajak hanya 676,426 Unit sehingga persentase wajib pajak yang membayar hanya 29%, yang menggunakan program kebijakan penghapusan administrasi sebanyak 51,491 unit. Pada tahun 2022 sebanyak 2,464,567 Unit kendaraan bermotor di Provinsi Jambi kemudian wajib pajak yang membayar pajak hanya 729,908 Unit sehingga persentase wajib pajak yang membayar hanya 29%, yang menggunakan program kebijakan penghapusan administrasi sebanyak 95,260 unit. Dimana faktanya dapat menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Diharapkan Pemerintah Daerah lebih optimal kembali dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Kata Kunci: Kebijakan, Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Hukum.

ABSTRACT

This research is aimed at: (1) To find out, the Government of Jambi Province policy in improving tax compliance of motor vehicles. (2) To know the implementation of the abolition of sanctions of motor vehicle tax administration in Jambi province. Regional taxes are taxes imposed by the regional government using the local regulations used to finance the maintenance of the local government. One of the biggest potential of a local tax is a motor vehicle tax, but there are still a lot of communities that do not comply with taxation which means that local governments have to make an effort to get new taxes and hope that people will pay their taxes. The Jambi Provincial Government has implemented a policy of tax clearance for motor vehicles, with the authority of the Governor of this province of Jambi, whenever this policy is implemented, the governor issued a Governor's Decree. This method of research is carried out through empirical law that uses primary data as the primary source, the location of the research is in the Financial and Regional Revenue Management Agency (BPKPD) of Jambi Province, the specification of research that the author uses is a method of descriptive analysis. The results of the research show that the number of motor vehicles in Jambi Province in 2020 there are a total of 2,185,414 units then the taxpayer who pays tax only 665,831 units so that the percentage of paying only 30%, which uses the administrative abolition policy program of 56,723 units. In 2021 there are the total of 2,319,596 units of motor vehicle in the Province of Jambi then taxpayers who pay tax only 676,426 units, so the percent of taxpaying who pay only 29%, who use the policy programme of administrative elimination of 51,491 units. Where the facts can raise public awareness of the law, it is hoped that the local government will be better back in socializing the public to the importance of paying taxes on time.

Keywords: Policy, Motor vehicle tax, Legal awareness.